

PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

Ni Komang Widiastuti

Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

e-mail : widiastuti_wi2d@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali (2001-2010). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis jalur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sektor pariwisata berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2001-2010. Penelitian ini juga memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dengan analisis jalur diketahui bahwa sektor pariwisata berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata kunci : sektor pariwisata, kinerja keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

This study aims to confirm the effect on the financial performance of the tourism sector and local public welfare districts/municipalities in the province of Bali (2001-2010). This study uses secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Bali and the Secretariat of the Provincial Finance Bureau of Bali. The analysis technique used is a factor analysis and path analysis. This study conclude that from 2001 to 2010 the tourism sector a significant effect on financial performance and welfare of local districts/ municipalities in the province of Bali. The study also obtain the result that the region's financial performance significantly influence public welfare districts/ municipalities in the province of Bali. With the analysis of the path is known that the tourism sector indirect effect on the financial performance of the public welfare through the district / city in the province of Bali.

Keywords: tourism sector, regional financial performance, social welfare

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti dikemukakan oleh Cohen (1984), Spillane (1987), serta Muljadi (2012), yaitu memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha di sektor formal dan informal, peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai pajak dan retribusi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan.

Archer (2000) menyatakan bahwa jumlah (volume) pengeluaran wisatawan akan menciptakan dampak langsung terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran sehingga dapat meningkatkan PDRB. Sektor perdagangan, hotel dan restoran tampil sebagai kontributor utama terhadap PDRB Provinsi Bali. Semakin berkembangnya sektor pariwisata memberikan dampak meningkatnya pendapatan asli daerah. Sebagai daerah tujuan wisata, sumber pajak daerah yang potensial di Provinsi Bali adalah pajak hotel dan restoran.

Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata pada suatu daerah yang direfleksikan oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB, serta kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan analisis rasio keuangan daerah terhadap laporan perhitungan APBD. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk

menilai kinerja keuangan daerah yaitu untuk mengukur upaya pemerintah daerah dalam menggali pendapatan asli daerah, mengukur kemandirian keuangan daerah serta mengukur aktivitas pemerintah dalam mengalokasikan dananya untuk pelayanan publik.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah yang peranannya sangat tergantung pada kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi di daerah. Pendapatan asli daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan daerah, karena sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002). Pendapatan asli daerah juga harus dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah serta pemanfaatannya benar-benar untuk pengeluaran yang produktif atau dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti untuk sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur fisik kota/kabupaten (Saragih, 2003)

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya keuangannya secara optimal (Simanjuntak, 2000). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer”, dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya (Todaro, 2000). Berdasarkan uraian yang dijelaskan tersebut maka yang menjadi fokus penelitian adalah “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali”.

KAJIAN PUSTAKA

Pariwisata

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009, menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, dengan demikian pariwisata meliputi: (1) semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, (2) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, (3) Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata.

Untuk mengukur pengaruh pariwisata terhadap perekonomian suatu wilayah/daerah dapat dilakukan melalui pendekatan pengeluaran wisatawan (*tourist expenditure*) dan pendekatan permintaan wisatawan (*tourist demand*) terhadap barang dan jasa. Pengeluaran wisatawan adalah pengeluaran yang dilakukan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Pengeluaran wisatawan dapat berupa akomodasi, konsumsi makanan, angkutan wisata, atau jasa-jasa lainnya. Permintaan langsung wisatawan dapat digunakan untuk melihat kontribusi wisatawan terhadap PDRB (BPS, 2001).

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali atau mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam

menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986).

Halim (2007) mengemukakan bahwa pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Beberapa rasio untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah (a) rasio kemandirian untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, (b) rasio keserasian untuk mengukur aktivitas pemerintah dalam mengalokasikan dananya pada pelayanan publik secara optimal dan (c) rasio upaya pemungutan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi daerah (PDRB).

Kesejahteraan Masyarakat

Pada tahun 1979, Moris memperkenalkan *physical quality life index* (PQLI) lazim diterjemahkan sebagai indeks kualitas hidup. Ada tiga indikator utama yang dijadikan acuan pada indeks ini yaitu tingkat harapan hidup pada usia satu tahun, tingkat melek huruf, dan tingkat kematian bayi (Todaro, 2000). Selanjutnya sejak tahun 1990, UNDP mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal dengan indeks pembangunan manusia. Nilai indeks pembangunan manusia ini diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan pendapatan riil per kapita (Todaro, 2000).

Penelitian Sebelumnya

Jember (2008) yang meneliti tentang pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2001-2006. Hasil regresi sederhana menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Utama (2006) dalam penelitian yang berjudul "Pengaruh Perkembangan Pariwisata terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali". Dari analisis jalur diketahui bahwa perkembangan pariwisata tidak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, namun perkembangan pariwisata berpengaruh secara tidak langsung melalui peningkatan kinerja perekonomian dan perubahan struktur ekonomi.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali dengan pertimbangan memiliki karakteristik perekonomian yang spesifik dan unik yaitu sebagai daerah destinasi wisata. Penelitian ini akan menganalisis data panel antara data *cross section*, yaitu data kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan data *times series* periode 2001-2010. Jenis data yang digunakan adalah: 1) Data kuantitatif yaitu meliputi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran, pajak hotel dan restoran, realisasi APBD, PDRB per kapita, usia harapan hidup dan rata-rata lama sekolah masyarakat, 2) Data kualitatif yaitu gambaran umum Provinsi Bali. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yang diperoleh dari BPS Provinsi Bali serta dari Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Bali.

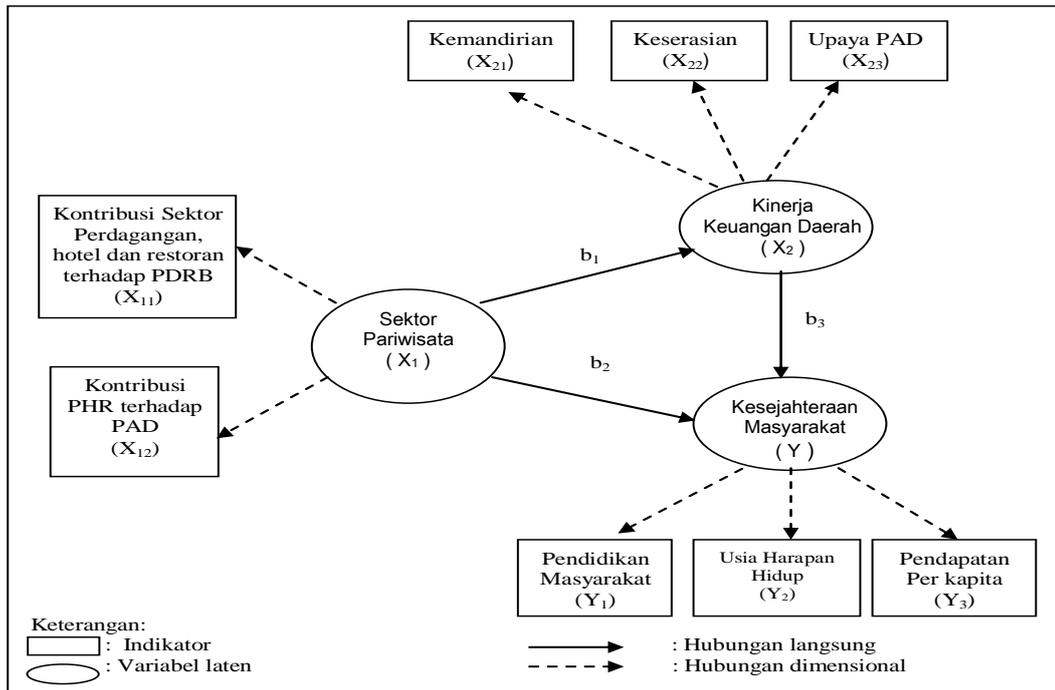
Variabel laten yang akan dihitung skor faktornya atau bobotnya dalam penelitian ini adalah sektor pariwisata, kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Variabel tersebut masing-masing terdiri atas beberapa indikator seperti yang dirinci pada Tabel 1.

Tabel 1
Kelompok dan Jenis Variabel Penelitian

Variabel Latent	Variabel Terukur (indikator)
Sektor Pariwisata (X_1)	1.1 Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB (X_{11}) 1.2 Kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah (X_{12})
Kinerja keuangan daerah (X_2)	2.1 Rasio kemandirian keuangan daerah (X_{21}) 2.2 Rasio keserasian belanja (X_{21}) 2.3 Rasio upaya pemungutan PAD (X_{23})
Kesejahteraan masyarakat (Y)	3.1 Rata-rata lama sekolah (Y_{11}) 3.2 Usia harapan hidup (Y_{12}) 3.3 Pendapatan per kapita masyarakat (Y_{13})

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis faktor dan analisis jalur. Analisis faktor digunakan untuk mendapatkan skor dari variabel laten yang dibentuk berdasarkan beberapa variabel terukur (Hair, *et al*, 1998). Sedangkan dari analisis jalur akan dapat dihitung pengaruh langsung antar variabel, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total (Kerllinger, 2002).

Hasil analisis diharapkan dapat mengevaluasi pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah, pengaruh sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat, pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat, serta pengaruh sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan daerah. Berdasarkan kerangka proses berpikir tersebut disusun kerangka konseptual seperti ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengukuran sektor pariwisata

Pengukuran sektor pariwisata dalam penelitian ini diturunkan dari kajian teoritis dan empiris sebagaimana disampaikan oleh Archer (2000), Pitana dan Gayatri (2005), BPS (2001) serta Utama (2006) yang dapat disimpulkan bahwa perkembangan sektor pariwisata dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah. Dari analisis faktor diperoleh nilai varians kumulatif sebesar 90,479 persen, yang artinya kedua variabel tersebut mampu menjelaskan konstruk sektor pariwisata sebesar 90,479 persen, sedangkan 9,52 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya indeks sektor pariwisata dari hasil analisis faktor ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Indeks Sektor Pariwisata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2001-2010

No	Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Buleleng	1,52	1,46	1,48	1,55	1,60	1,48	1,43	1,53	1,57	1,55	1,52
2	Jembrana	1,30	1,28	1,28	1,29	1,30	1,29	1,33	1,28	1,30	1,33	1,30
3	Tabanan	1,39	1,39	1,29	1,35	1,41	1,40	1,48	1,34	1,44	1,43	1,39
4	Badung	4,27	4,23	4,30	4,21	4,16	4,14	4,09	3,87	3,96	3,99	4,12
5	Gianyar	2,63	2,70	2,66	2,66	2,58	2,51	2,33	2,43	2,41	2,65	2,56
6	Bangli	1,57	1,58	1,51	1,46	1,37	1,30	1,22	1,19	1,20	1,39	1,38
7	Klungkung	1,01	1,03	1,00	1,11	1,07	1,08	1,04	1,08	1,06	1,06	1,05
8	Karangasem	1,17	1,14	1,14	1,18	1,22	1,22	1,16	1,26	1,31	1,19	1,20
9	Denpasar	2,93	2,93	3,01	3,00	3,02	2,95	2,92	3,02	3,06	3,33	3,02
Rata-rata		1,98	1,97	1,96	1,98	1,97	1,93	1,89	1,89	1,92	1,99	1,95

Sumber: Hasil Analisis Faktor Konstruk Sektor Pariwisata (data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 diketahui secara rata-rata indeks pariwisata kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2001-2010 mengalami fluktuasi. Sektor pariwisata sangat rentan dengan situasi politik dan keamanan. Secara rata-rata indeks sektor pariwisata tertinggi diduduki oleh Kabupaten Badung, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Menurut Rai Utama (2011) ketiga kabupaten tersebut memiliki daya dukung yang kuat atas empat atribut pariwisata yaitu, “*attraction*”, “*acesable*”, “*amenities*”, dan “*ancillary*” sehingga layak mengandalkan sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian daerah.

Pengukuran kinerja keuangan daerah

Kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diturunkan dari teori Halim (2007), Mahsun (2006) penelitian empiris Utama (2007) dan Jember (2008), bahwa kinerja keuangan daerah dilihat dari rasio keuangan yaitu: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio keserasian belanja serta kinerja pemungutan pendapatan asli daerah. Dari analisis faktor diperoleh nilai varians kumulatif sebesar 73,212 persen, yang artinya sebesar 73,212 persen konstruk kinerja keuangan daerah mampu dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Selanjutnya indeks kinerja keuangan daerah dari hasil analisis faktor ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Indeks Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2001 – 2010

No	Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Buleleng	1,31	1,26	1,27	1,38	1,30	2,01	1,95	1,88	1,83	1,70	1,59
2	Jembrana	1,00	1,20	1,52	1,71	1,66	1,94	2,05	1,88	1,57	1,74	1,63
3	Tabanan	1,75	2,08	2,04	2,24	2,23	2,22	1,97	2,18	2,14	2,14	2,10
4	Badung	5,54	5,04	4,25	4,96	4,93	4,53	4,68	5,16	5,03	4,89	4,90
5	Gianyar	2,49	2,58	2,22	2,61	2,61	2,77	2,33	2,35	2,33	2,19	2,45
6	Bangli	1,27	1,41	1,64	1,78	1,80	1,97	2,19	1,88	1,68	1,56	1,72
7	Klungkung	1,86	2,00	2,01	2,26	2,20	2,31	2,43	2,02	2,05	1,69	2,08
8	Karangasem	1,79	1,90	1,91	2,22	2,20	2,44	2,18	2,21	2,07	1,68	2,06
9	Denpasar	2,98	2,66	2,72	2,61	2,74	2,70	2,87	2,76	2,79	2,51	2,73
Rata-rata		2,22	2,24	2,17	2,42	2,41	2,54	2,52	2,48	2,39	2,23	2,36

Sumber: Hasil Analisis Faktor Konstruk Kinerja Keuangan Daerah (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa secara rata-rata indeks kinerja keuangan daerah kabupaten/kota mengalami peningkatan. Indeks kinerja keuangan daerah yang paling baik dimiliki oleh Kabupaten Badung disusul Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan. Sejalan dengan hasil penelitian Purbadharmaja (2007), bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, kinerja pemungutan PAD dan tingkat kemandirian keuangan daerah di wilayah Sarbagita lebih tinggi dibandingkan dengan di luar wilayah Sarbagita. Wilayah Sarbagita memiliki potensi ekonomi yang lebih baik, yaitu banyak memiliki akomodasi wisata seperti hotel dan restoran sehingga berpotensi menghasilkan pajak hotel dan restoran sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Pengukuran Kesejahteraan Masyarakat

Model pengukuran variabel kesejahteraan masyarakat mengacu pada teori yang dikemukakan Moris (1979) dan UNDP (1990) dalam Todaro (2000), serta penelitian empiris Utama (2007) dan Jember (2008), yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan indeks komposit dari tiga indikator, yaitu

indikator kesehatan (usia harapan hidup), indikator pendidikan (rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi (pendapatan per kapita). Dari analisis faktor diperoleh nilai varians kumulatif sebesar 69,095 persen, yang artinya sebesar 69,095 persen konstruk kesejahteraan masyarakat mampu dijelaskan oleh ketiga indikator tersebut, sedangkan 30,91 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya indeks kesejahteraan masyarakat ditampilkan pada Tabel 4.

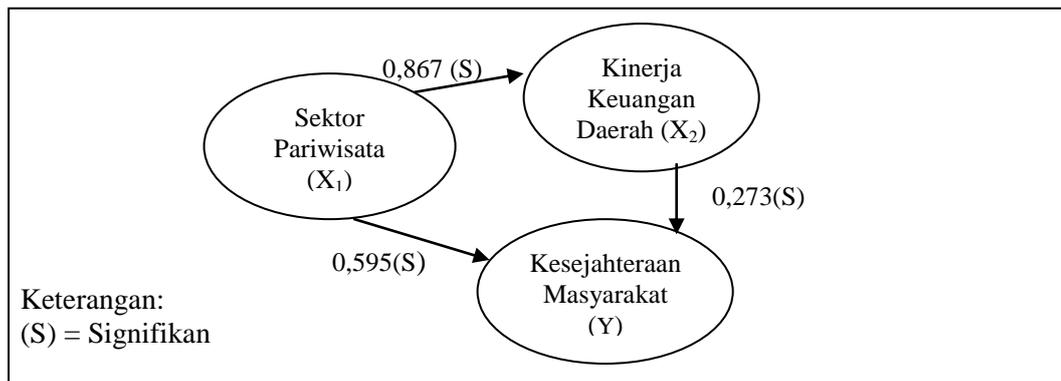
Tabel 4.
Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2001 – 2010

No	Kab/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1	Buleleng	1,54	1,19	1,20	1,29	1,27	1,54	1,49	1,50	1,50	2,89	1,54
2	Jembrana	2,19	1,08	1,23	1,32	1,30	1,42	1,49	1,39	1,25	3,56	1,62
3	Tabanan	1,38	1,54	1,46	1,59	1,61	1,60	1,52	1,55	1,58	3,90	1,77
4	Badung	4,46	4,17	3,83	4,11	4,08	3,89	3,94	4,05	4,03	4,96	4,15
5	Gianyar	2,32	2,35	2,17	2,35	2,32	2,35	2,07	2,12	2,11	3,82	2,40
6	Bangli	1,25	1,32	1,39	1,43	1,39	1,44	1,50	1,35	1,26	3,03	1,54
7	Klungkung	1,25	1,33	1,32	1,48	1,44	1,49	1,54	1,36	1,37	2,99	1,56
8	Karangasem	1,00	1,33	1,34	1,50	1,51	1,61	1,47	1,54	1,49	2,18	1,50
9	Denpasar	2,64	2,49	2,55	2,50	2,57	2,52	2,59	2,58	2,61	4,67	2,77
	Rata-rata	2,00	1,87	1,83	1,95	1,94	1,99	1,96	1,94	1,91	3,55	2,09

Sumber: Hasil Analisis Faktor Kinerja Keuangan Daerah (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa indeks kesejahteraan masyarakat menunjukkan peningkatan. Secara rata-rata daerah yang memiliki indeks kesejahteraan masyarakat paling baik adalah Kabupaten Badung, kemudian disusul oleh Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Tabanan. Segmentasi sektor tersier yang berbasis jasa-jasa pendukung pariwisata sebagian besar berada di wilayah Sarbagita. Sehingga kondisi sosial ekonomi masyarakatnya lebih baik dibandingkan daerah lainnya (BPS, 2010). Daerah dimana pariwisata kurang berkembang maka pendapatan per kapitanya rendah dan ternyata jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan cukup tinggi. Kondisi ini dapat dilihat di Kabupaten Buleleng, Karangasem, Klungkung dan Bangli (Erawan, 2004).

Berdasarkan hasil regresi sederhana dibuat ringkasan koefisien jalur seperti yang disajikan pada Gambar 2, bahwa antar variabel menunjukkan ada pengaruh langsung yang signifikan.



Gambar 2. Diagram Hasil Penelitian

Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian ini menemukan bahwa sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan yang direfleksikan oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang dicerminkan oleh meningkatnya kinerja pemungutan pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah dan meningkatnya alokasi belanja publik (keserasian belanja). Semakin berkembangnya sektor pariwisata menyebabkan semakin besar potensi penerimaan pendapatan asli daerah sehingga dapat menunjang kemandirian keuangan daerah serta meningkatkan penerimaan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengaruh positif sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah mendukung teori yang dikemukakan oleh Halim (2001) yang menyatakan bahwa

semakin berkembangnya kegiatan ekonomi suatu daerah, misalnya sektor produksi, perdagangan, jasa, pariwisata serta sektor ekonomi lainnya, maka semakin besar potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil studi empiris Sudemen (2009) dan Rai Utama (2011) juga menyatakan bahwa pengeluaran sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat lokal menggeliat, menjadi stimulus berinvestasi serta menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya. Pitana dan Gayatri (2005) menyatakan bahwa pajak hotel dan restoran sangat besar peranannya bagi pembangunan Bali. Supriady (2002) dan Kuncoro (2004) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah yang diantaranya bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen penyumbang pendapatan pemerintah terbesar diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata kabupaten/kota di Provinsi Bali berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin berkembangnya sektor pariwisata memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh industri pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata akan menciptakan dampak langsung terhadap sektor perdagangan, hotel dan restoran sehingga dapat meningkatkan PDRB. Meningkatnya PDRB yang lebih cepat dari pertumbuhan penduduk menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat, sehingga akses terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat juga meningkat.

Pengaruh positif sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat juga disampaikan Bupati Badung yang menyatakan bahwa pajak hotel sampai saat ini masih merupakan primadona dalam struktur pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak hotel dan restoran Kabupaten Badung mencapai 80 persen dari penerimaan PAD-nya. Dari sumber pendapatan itu, Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Badung berupaya mengelola dan memanfaatkannya dengan baik untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana wilayah dan kesejahteraan masyarakat (Fajar Bali, 2012).

Adanya pengaruh positif perkembangan pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pandangan *perspektif developmentalist* yang dikemukakan oleh Pye dan Lin (1983) yang menegaskan bahwa industri pariwisata telah banyak menyumbangkan kecepatan, percepatan, dan arah perkembangan di negara-negara berkembang sehingga dianggap sebagai “pintu masuk” bagi kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, Travis pada tahun 1984 (dalam Pitana, 2005) mengemukakan mengenai dampak positif pariwisata diantaranya adalah dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat dan dampak terhadap peningkatan pendidikan masyarakat serta peningkatan fasilitas sosial masyarakat.

Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang dicerminkan oleh meningkatnya upaya pemungutan pendapatan asli daerah, kemandirian keuangan daerah serta keserasian belanja daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Pengaruh positif kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat juga sesuai dengan pendapat Todaro (2000), yang mengatakan bahwa kapasitas keuangan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, yaitu secara langsung berupa “pembayaran transfer”, dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan kerja, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan sebagainya. Sebagaimana dikemukakan Arsyad (2010) bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Adi Widodo dkk (2011) menyimpulkan bahwa prioritas anggaran belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sekurangnya ada dua sektor yang perlu diperhatikan pemerintah daerah memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan dan kesehatan. Dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah daerah pada sektor publik tersebut akan meningkatkan produktivitas penduduk, sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah sesuai dengan pendapat Minnassian pada tahun 1997 (dalam Blanchard, 2000) dan Saragih (2003) yang menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai karena keputusan-keputusan publik pemerintah yang diimplementasikan dalam peran alokasi dan distribusi atas sumber-sumber ekonomi daerah. Suwandi (2000)

dan Halim (2001) menyatakan bahwa kapasitas keuangan pemerintah daerah akan menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan dan fungsi perlindungan masyarakat.

Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kinerja Keuangan Daerah

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Ini berarti perkembangan sektor pariwisata dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah, selanjutnya peningkatan kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh langsung sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,595, sedangkan pengaruh tidak langsung sektor pariwisata melalui kinerja keuangan daerah hanya sebesar $(0,867 \times 0,273) = 0,237$, atau hanya sebesar 0,3 kali dibanding pengaruh langsungnya. Kinerja keuangan daerah hanya salah satu aspek yang harus dipenuhi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pembahasan dan analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2001–2010. Keberhasilan pengembangan sektor kepariwisataan, akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah sehingga meningkatkan kinerja keuangan daerah yang dicerminkan oleh rasio kinerja pemungutan pendapatan asli daerah (*fiscal effort*), rasio kemandirian keuangan daerah serta rasio keserasian

belanja. Kinerja keuangan daerah yang baik akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya kemandirian keuangan daerah yang dibarengi meningkatnya pengeluaran pemerintah pada belanja publik. Dampak langsung perkembangan pariwisata menyebabkan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB sehingga menyebabkan meningkatnya pendapatan per kapita, meningkatnya pendidikan masyarakat dan meningkatnya harapan hidup di Provinsi Bali. Melalui analisis jalur diketahui sektor pariwisata secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kinerja keuangan daerah, yaitu sebesar 0,3 kali pengaruh langsung sektor pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Saran

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi pariwisata di Provinsi Bali selama ini lebih terkonsentrasi di wilayah pembangunan Bali Selatan yang dikenal Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan antarwilayah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah agar merubah strategi pembangunan sektoral di Provinsi Bali ke arah yang lebih merata, dengan cara pemeratakan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata seperti akomodasi dan transportasi, atau dengan cara menyelenggarakan event-event di wilayah Bali di luar Sarbagita sehingga dapat memperkenalkan dan memajukan pariwisata di luar Sarbagita.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali hendaknya selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara menciptakan sumber penerimaan pajak daerah yang baru, serta melakukan pungutan dengan lebih giat, lebih ketat, dan lebih teliti melalui perbaikan organisasi pengelola, aspek ketata laksanaan dan aspek personalianya. Selain itu, pemerintah daerah juga disarankan untuk lebih meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk sektor publik terutama kebutuhan dasar masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan seperti peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, menyediakan jaminan pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin.

Referensi

- Adi Widodo, Waridin dan Johanna Maria K. 2011. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Pembangunan Manusia Vol.5 No.2 Tahun 2011*.
- Archer, B.H. 2000. *Tourism and Island Economies: Impact Analysis*, dalam: Clem Tisdell, *The Economics of Tourism, Volume II, An Elgar Reference Collection*, Cheltenham, UK Northampton, USA.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5, Cetakan Pertama. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Blanchard, O dan A.Shleifer, 2000. *Fiscal Federalism with and without Political Centralization: China Versus Russia*. NBER Working Paper #7616.
- BPS Provinsi Bali. 2001. "Tabel Input Output Pariwisata 2000". Kerja sama Antara Bappeda Provinsi Bali dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- , 2010. "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali 2005-2009". Bappeda Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali.

- Erawan, Nyoman. 2004. *Pariwisata Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional dan Daerah (Bali sebagai kasus)*. Proceeding Konferensi Kepariwisataan Indonesia 2004. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. Jakarta.
- Fajar Bali. Kamis, 27 Desember 2011. *Pajak Hotel Primadona Dalam Struktur PAD Badung*.
- Hair, J.F. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Fourth Edition. New York: Macmillan Publishing Company.
- Halim, Abdul 2001. *Bunga Rampai : Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- , 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Jember, I Made dkk. 2008. *Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2006*. Universitas Udayana: Denpasar.
- Kerlinger, Fred. N. 2002. *Asas-asas Penelitian Beharioral*. Edisi Ketiga Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
- Muljadi, AJ. 2012. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Cetakan ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Pitana, I Gde dan Putu Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata, Kajian Sosiologis terhadap Struktur, Sistem dan Dampak-dampak Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Purbadharmaja, IB Putu. 2007. *Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja serta Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2006*. Universitas Udayana: Denpasar
- Pye, Elwood A. and Tzong-Biau Lin. 1983. *Tourism in Asia, The Economic Impact*, Singapura: Singapore University Press.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Disentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Simanjuntak, Robert, 2000. *Decentralization and Local Outonomy*. Makalah Work Shop Otonomi Daerah, Kerjasama LPEM- UI dan IRIS Jakarta.

- Spillane, James, J. 1987. *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudemen, I Wayan. 2009. Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Provinsi Bali. *Sarathi* Vol. 16 No.3. Oktober 2009.
- Suwandi, Made, 2000. Agenda Strategis Penataan Otonomi Daerah (Sebagai tindak lanjut UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999), *Makalah Work Shop Otonomi Daerah*, Kerjasama LPEM- UI dan IRIS Jakarta.
- Utama, Suyana 2006. Pengaruh Perkembangan Pariwisata Terhadap Kinerja Perekonomian dan Perubahan Struktur Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali (disertasi). Surabaya. Universitas Airlangga.
- , 2007. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2006. Denpasar. Universitas Udayana.
- Rai Utama, I Gusti Bagus. 2011. Dimensi Ekonomi Pariwisata: Kajian Terhadap Dampak Ekonomi dan Refleksi Dampak Pariwisata terhadap Pembangunan Ekonomi Provinsi Bali. Universitas Udayana: Denpasar.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Buku 1 Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga.